

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang berupaya meningkatkan berbagai sektor, salah satunya sektor perekonomian. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada pengembangan industri dan program pemerintah, tetapi juga melibatkan peran penting dari sektor ekonomi informal.¹ Salah satu inisiatif pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi informal adalah dengan mempromosikan perdagangan, khususnya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menggeluti wirausaha, sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa UMKM adalah usaha produktif yang dapat didirikan baik oleh individu maupun badan usaha. Usaha ini tidak boleh merupakan cabang atau anak perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria untuk mengklasifikasikan usaha sebagai mikro, kecil, atau menengah dijelaskan dalam undang-undang tersebut dan mencakup berbagai

¹ Vindry Ria Andiki Powatu, “Peran Sektor Informal Dalam Ekonomi Nasional,” *Ekonomi* 1, no. 5 (May 22, 2024): 1–3, accessed May 16, 2025, <http://www.circle-archive.com/index.php/carc/article/view/224>.

² Anugrah Natalina, Arif Zunaidi, and Risa Rahmah, “Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Strategi Survive Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Di Kota Kediri,” *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development* 5, no. 2 (2021), accessed May 16, 2025, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/85>.

aspek yang mendefinisikan batasan modal dan hasil penjualan tahunan.³

Tabel 1. 1

Kategori Usaha Berdasarkan Undang-Undang Tentang UMKM

Kategori Usaha	Aset Bersih	Omzet Bersih Tahunan
Mikro	Maksimal Rp. 1 miliar	Maksimal Rp. 2 miliar
Kecil	Rp. 1 miliar - Rp. 5 miliar	Rp. 2 miliar - Rp. 15 miliar
Menengah	Rp. 5 miliar - Rp. 10 miliar	Rp. 15 miliar - Rp. 50 miliar

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, Pasal 35 ayat (3)

Namun kenyataannya, hambatan dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan efisiensi usaha sangatlah kompleks, melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif dari seluruh aspek tidak hanya terkait dengan pertumbuhan aset, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti permodalan.⁴

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses permodalan. Sebanyak 51,2% pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal karena ketergantungan pada modal pribadi yang jumlahnya terbatas. Selain itu, kendala administratif menjadi penghalang utama bagi pelaku usaha untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal, seperti bank. Banyak UMKM tidak dapat memenuhi persyaratan administratif, seperti pencatatan keuangan yang memadai atau agunan yang diminta oleh lembaga keuangan. Hal ini membuat mayoritas UMKM bergantung pada modal

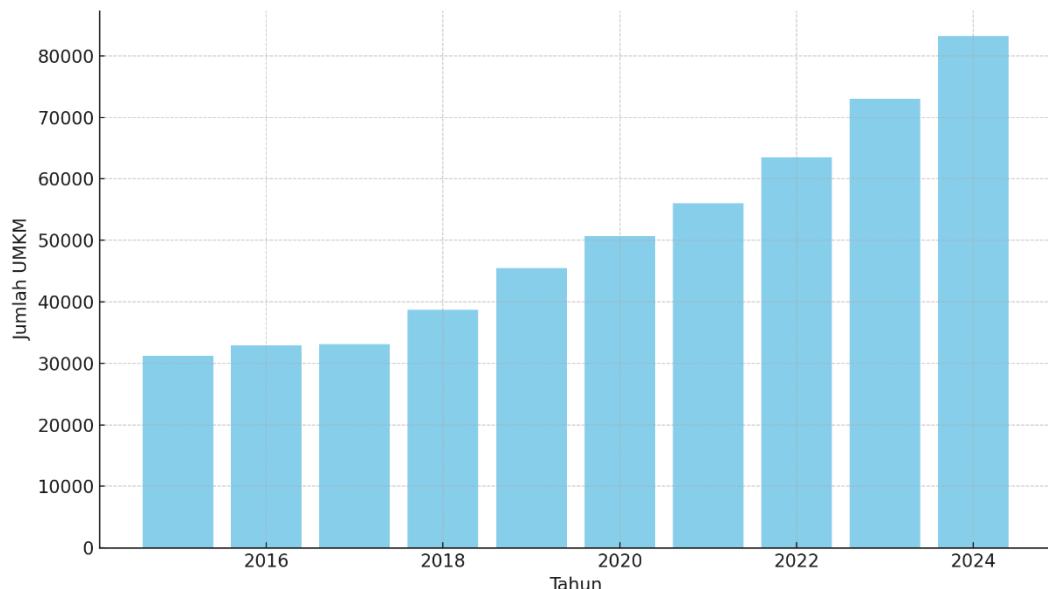
³ Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, n.d.

⁴ Al Idrus Sy. Mawaddah and Safitri Teti Anggita, "Analisi Perbandingan Kinerja Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah," Manajerial Vol. 20, no. 2 (December 2021): 300, <http://ejournal.upi.edu/index.php/manajerial/>.

pribadi atau sumber informal lainnya, yang sering kali tidak mencukupi untuk mendirikan, mengembangkan, dan memajukan bisnis mereka.⁵

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Kota Kediri. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan UMKM di kota ini menunjukkan tren yang positif dan signifikan.

Gambar 1.1
Perkembangan Data UMKM di Kota Kediri Tahun 2015-2024



Sumber: BPS Kota Kediri <https://kedirkota.bps.go.id>

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa di beberapa tahun terakhir, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri menunjukkan bahwa jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa UMKM semakin berperan

⁵ Indra Mualim Hasibuan and Marliah, "Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dari Lembaga Keuangan (Obstacles of Accessibility of Financing for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) from Financial Institutions)," *Aksioma: Jurnal Manajemen* 3, no. 1 (February 2024): 16.

penting dalam perekonomian daerah, baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada tahun 2015, jumlah UMKM di Kota Kediri tercatat sebanyak 31.000 unit. Ini merupakan angka dasar yang menunjukkan eksistensi sektor UMKM pada awal periode analisis. Setahun kemudian, pada tahun 2016, jumlah UMKM mengalami peningkatan menjadi 32.952 unit, yang berarti terdapat tambahan sekitar 1.952 unit dalam satu tahun. Peningkatan ini masih tergolong stabil, mencerminkan pertumbuhan yang berjalan secara organik dengan adanya dorongan dari sektor ekonomi lokal. Pada tahun 2017, jumlah UMKM terus bertambah menjadi 33.000 unit, meskipun pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, lonjakan signifikan mulai terlihat pada tahun 2018, di mana jumlah UMKM naik drastis menjadi 38.806 unit. Peningkatan ini menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang mendorong perkembangan UMKM secara lebih masif, seperti kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha kecil dan menengah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewirausahaan.⁶

Tren pertumbuhan terus berlanjut hingga tahun 2019, di mana jumlah UMKM di Kota Kediri mencapai 45.629 unit. Pertumbuhan yang semakin pesat ini mencerminkan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam berbagai sektor. Pada tahun 2020, jumlah UMKM meningkat lagi menjadi 50.699 unit. Pada tahun 2021, jumlah UMKM kembali mengalami kenaikan menjadi 56.507 unit, yang berarti terdapat tambahan sekitar 5.808 unit dalam

⁶ Badan Pusat Statistik, *Jumlah UMKM Di Kota Kediri Tahun 2015-2024*, n.d., <https://kedirikota.bps.go.id>.

satu tahun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa UMKM tetap menjadi sektor yang bertahan dan bahkan berkembang pascapandemi. Dengan semakin banyaknya dukungan dari pemerintah melalui berbagai program bantuan, serta digitalisasi UMKM yang semakin masif, jumlah UMKM terus bertambah hingga mencapai 63.584 unit pada tahun 2022.

Kemudian pada tahun 2023, jumlahnya melonjak menjadi 73.137 unit. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan tambahan 9.553 unit dalam setahun. Kemudian pada tahun 2024 pertumbuhan ini terus berlanjut hingga mencapai 10.035 sehingga jumlah UMKM hingga tahun 2024 yaitu mencapai 83.172.⁷

Untuk mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh usaha mikro, Pemerintah Kota Kediri telah meluncurkan program bantuan modal usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Program ini dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro dan menengah, agar mereka dapat bertahan dan berkembang dalam menjalankan usahanya. Melalui program bantuan modal usaha menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM.⁸

Untuk menerima bantuan modal usaha, ada kriteria pelaku usaha tertentu yang akan menjadi sasaran penerima Bantuan Modal Usaha ini, antara lain buruh pabrik rokok, pekerja pabrik rokok, wirausaha sektor perindustrian, dan wirausaha sektor perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023, perubahan atas aturan

⁷ Ibid.

⁸ Muhammad Sulthon, *Pemkot Kediri Beri Bantuan Modal Usaha Dari Dana Bagi Hasil Cukai Ke UMKM*, November 2023, accessed February 26, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7063337/pemkot-kediri-beri-bantuan-modal-usaha-dari-dana-bagi-hasil-cukai-ke-umkm>.

Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian antuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Selain itu untuk menjadi penerima bantuan modal usaha ini, ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi, seperti KTP harus Kota Kediri dan domisili di Kota Kediri, lokasi usaha di Kota Kediri, usia 18 - 64 Tahun, hanya ada satu penerima dalam setiap KK, dan bukan penerima bantuan modal usaha tahun sebelumnya.⁹

Pemerintah berharap dengan bantuan modal ini pemerintah dapat mendorong pengembangan usaha mikro, bantuan modal ini dapat digunakan untuk modal kerja, seperti pembelian bahan baku, peralatan, dan perlengkapan usaha guna mendukung operasional sehari-hari. Selain itu, pelaku usaha juga dianjurkan untuk menggunakan dana tersebut untuk peningkatan kualitas produk, baik dari segi bahan maupun proses produksi, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik. Dana ini juga dapat digunakan untuk pengembangan usaha, misalnya membuka cabang baru atau memperluas jangkauan pasar.¹⁰

Pengembangan usaha sendiri terdapat beberapa tolak ukur atau indikatornya, indikator pengembangan usaha dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti dalam Muhammad Sholeh. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan perkembangan pelaku usaha. Di antaranya adalah peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan jumlah

⁹ Peraturan Perundang-undangan, *Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Aturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau* (Kediri, February 2, 2023).

¹⁰ Sulthon, Pemkot Kediri Beri Bantuan Modal Usaha Dari Dana Bagi Hasil Cukai Ke UMKM. November 2023, accessed February 26, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7063337/pemkot-kediri-beri-bantuan-modal-usaha-dari-dana-bagi-hasil-cukai-ke-umkm>.

tenaga kerja, serta perkembangan jumlah pelanggan.¹¹ Semakin konkret tolok ukur ini, semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami dan membenarkan keberhasilan yang diraih oleh pelaku usaha, oleh karena itu penerima bantuan diwajibkan melaporkan penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disusun dan diajukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdadin) Kota Kediri, hal ini bertujuan supaya dana yang diberikan dapat digunakan dengan baik untuk pengembangan usaha mereka. Untuk nominal yang diberikan kepada masing-masing pelaku usaha yaitu sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau sebesar Rp2.400.000. ¹²

Untuk menjadi penerima Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Kediri, terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.¹³ Berikut tabel bantuan modal usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) dari tahun ke-tahun.

¹¹ Muhammad Sholeh, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

¹² Pemkot Kediri, “Wali Kota Kediri Umumkan 10.150 Penerima Bantuan Modal 2023,” *Pemerintah Kota Kediri.*, last modified July 12, 2023, accessed December 14, 2024, <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10111766/wali-kota-kediri-umumkan-10150-penerima-bantuan-modal-2023>.

¹³ Redaksi, “Serahkan Bantuan Modal Usaha DBHCHT Tahun 2024, Pj Wali Kota Kediri Tekankan Hal Berikut,” *Beritakediri.Com*, last modified August 7, 2024, accessed December 14, 2024, <https://www.beritakediri.com/serahkan-bantuan-modal-usaha-dbhcht-tahun-2024-pj-wali-kota-kediri-tekankan-hal-berikut/>.

Tabel 1. 2
Data Penerima Bantuan Modal Usaha yang Bersumber Dari DBHCHT
Kota Kediri Tahun 2021-2024

NO	PENERIMA TAHUN	KOTA	PESANTREN	MOJOROTO	TOTAL
1	2021	5	11	3	19
2	2022	354	457	531	1.342
3	2023 (TAHAP 1)	1.959	1.869	2.813	6.641
4	2023 (TAHAP 2)	1.090	1.298	1.602	3.990
5	2024	1.498	1.825	2.253	5.576
TOTAL		4.906	5.460	7.202	17.568

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2021, program Bantuan Modal diperkenalkan untuk mendukung pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini berhasil menjangkau 19 penerima dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang saat itu menghadapi tantangan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Kediri menyalurkan bantuan modal dari DBHCHT kepada 1.342 pemilik usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penerima bantuan ini mencakup buruh pabrik rokok yang memiliki usaha, pekerja pabrik rokok yang juga menjalankan usaha, pelaku industri kecil dan menengah (IKM), serta wirausaha baru di bidang industri dan perdagangan. Besaran bantuan yang diberikan bervariasi, dengan nilai maksimal mencapai Rp10 juta.¹⁴

¹⁴ Lilin Nuryani, *Wawancara Kepala Bidang Perindustrian Kota Kediri* (Kediri, January 21, 2025).

Selanjutnya, pada tahun 2023, Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan modal usaha dengan total penerima bantuan tahun itu mencapai 10.631 orang. Total anggaran yang dialokasikan dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk UMKM di Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp28 miliar. Pada tahun itu juga awal munculnya sistem skoring dimana pada tahap I, Disperindag membuka sebanyak 10.631 pelaku usaha kemudian akan dipilih sebanyak 6.641 pelaku usaha dengan skor tertinggi, dan sisa 3.990 pelaku usaha ini akan masuk pada tahap II dengan skor rendah. Kemudian, pada tahun 2024, pemerintah kembali menyalurkan bantuan modal usaha kepada 5.576 pelaku UMKM.¹⁵

Dalam tabel 1.2 memberikan informasi jika tahun 2023 menjadi tahun paling banyak dalam penerimaan bantuan modal usaha dibandingkan tahun lainnya, wilayah Mojoroto tercatat menjadi wilayah yang paling banyak dengan jumlah 4.415 penerima bantuan modal. Terdapat dua tahap penerimaan dimana pada tahap satu sebanyak 2.813 dan tahap dua sebanyak 1.603. Di Kelurahan Mojoroto sendiri terdapat 14 kelurahan yang tercatat menjadi penerima bantuan modal usaha DBHCHT, empat belas kecamatan tersebut terdiri dari:

Tabel 1. 3
Data penerima Bantuan Modal Usaha DBHCHT di Kelurahan
Mojoroto Tahun 2023 Tahap II

No	Kelurahan	Jumlah Penerima
1	Bujel	164
2	Bandar Kidul	158
3	Pojok	158
4	Bandar Lor	154
5	Campurejo	128

¹⁵ Ibid.

6	Ngampel	126
7	Lirboyo	119
8	Mojoroto	116
9	Sukorame	102
10	Banjarmelati	93
11	Mrican	95
12	Tamanan	79
13	Gayam	60
14	Dermo	50

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 1.3, Kelurahan Bujel tercatat menjadi wilayah dengan penerima paling banyak yaitu sebanyak 164 pelaku usaha diantara 13 kelurahan lainnya.¹⁶ Terdapat 16 jenis usaha di Kelurahan Bujel yang mendapat penyaluran bantuan modal usaha DBHCHT ini, 16 jenis usaha itu antara lain:

Tabel 1. 4
Jenis Usaha Penerima Bantuan Modal Usaha DBHCHT
di Kelurahan Bujel

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Rumah Makan (warung, cafe, restoran, kedai makanan, kedai minuman)	58
2	Toko (pracangan, los pasar)	34
3	Usaha Perdagangan Lainnya	22
4	Laundry	12
5	Makanan (roti & kue, krupuk)	11
6	Pedagang Kaki Lima	9
7	Tambal Ban, Jual Bensin Eceran	9
8	Fashion (barang jadi baju, kaos, dll.)	5
9	Kerajinan (kain tenun, kain batik, rajut, sulaman, handicraft, aksesoris, hiasan, lukisan, furnitur, dan sebagainya)	4
10	Industri Aneka Lainnya	2
11	Cuci Motor/Mobil	1

¹⁶ Ibid.

12	Tambal Ban, Jual Bensin Eco	1
13	Salon, MUA, Potong Rambut	1
14	Toko Online (distributor, agen, reseller - harus ada stok barang)	1
15	Penerbitan & Percetakan (fotokopi, cetak 3D, cetak)	1
16	Reparasi (bengkel, service peralatan)	1

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Dari data tersebut tercatat jenis usaha rumah makan (warung, *cafe*, restoran, kedai makanan, kedai minuman) menjadi jenis usaha yang paling banyak menerima bantuan modal yaitu sebanyak 58 rumah makan (warung, *cafe*, restoran, kedai makanan, kedai minuman), hal ini menjadikan rumah makan sebagai jenis usaha yang paling banyak menerima bantuan modal usaha dari 15 jenis usaha lainnya.¹⁷

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, Wahyu Kusuma Wardani, mengungkapkan bahwa program ini dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro dan menengah agar dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih efektif, bertahan di tengah persaingan, bahkan berkembang. Melalui bantuan modal usaha dan pendampingan, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan fasilitas, kapasitas produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan langkah ini, perekonomian masyarakat diharapkan semakin tumbuh kuat dan kesejahteraan warga pun meningkat.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Asmaul Chusna and M. Tohamaksun, “5.617 UMKM Di Kota Kediri Dapat Bantuan Modal Usaha DBHCHT 2024,” *ANTARA* , last modified August 6, 2024, accessed December 14, 2024, https://www.antaranews.com/berita/4242139/5617-umkm-di-kota-kediri-dapat-bantuan-modal-usaha-dbhcht-2024#google_vignette.

Pada pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa pelaku usaha yang dimana usaha mereka mengalami pengembangan setelah menerima bantuan modal, seperti Bapak Takwin berusia 46 tahun adalah pemilik usaha warung yang awalnya hanya menjual minuman. Sebelum mendapatkan bantuan modal, omset hariannya sekitar Rp400.000. Setelah menerima bantuan, ia menggunakan dana tersebut untuk membeli etalase kecil dan menambah menu gorengan. Hal ini meningkatkan omset hariannya menjadi Rp750.000. Jumlah karyawan pun bertambah dari 2 menjadi 3 orang. Penambahan menu juga membawa dampak positif terhadap jumlah pelanggan. Usahanya berkembang karena ada inovasi produk dan peningkatan fasilitas.¹⁹

Ibu Novita berusia 41 tahun memiliki usaha toko minuman. Sebelum menerima bantuan modal, omset hariannya hanya Rp150.000. Setelah mendapatkan banmod, ia memperluas jenis usaha dengan menjual bensin, sehingga omsetnya naik menjadi Rp300.000 per hari. Meskipun ia menjalankan usahanya sendiri tanpa karyawan, penambahan jenis produk terbukti menarik lebih banyak pelanggan. Usaha ini berkembang karena diversifikasi produk yang dibutuhkan masyarakat.²⁰

Bapak Jamal berusia 46 tahun adalah pemilik usaha Mie Aceh. Sejak awal ia sudah menjual Mie Aceh dan setelah menerima bantuan modal, omset hariannya meningkat dari Rp300.000 menjadi sekitar Rp450.000, bahkan lebih saat ramai. Usaha ini dikelola sendiri bersama istri tanpa karyawan tambahan. Penambahan pelanggan juga dirasakan. Usahanya berkembang karena adanya

¹⁹ Wawancara Bapak Takwin Pemilik Warung, March 1, 2025.

²⁰ Wawancara Ibu Novita Pemilik Toko Minuman, March 1, 2025.

suntikan modal yang mendukung penguatan operasional dan pemasaran produk.²¹

Ibu Dian berusia 40 tahun menjalankan usaha minuman dan makanan ringan. Sebelum mendapat bantuan modal, omset hariannya hanya sekitar Rp70.000. Bantuan digunakan untuk membeli rompong dan menambah produk baru berupa es batu. Kini, omset hariannya meningkat menjadi lebih dari Rp130.000. Ia menjalankan usahanya sendiri tanpa karyawan. Penambahan pelanggan terjadi seiring dengan penambahan variasi produk. Usahanya berkembang karena adanya penambahan produk dan sarana jualan.²²

Bapak Febri berusia 41 tahun adalah pemilik usaha nasi ayam geprek. Sebelum mendapat bantuan modal, omsetnya sekitar Rp270.000 per hari. Setelah menerima bantuan, ia membeli bahan-bahan tambahan dan memperkenalkan menu baru, sehingga omset hariannya naik menjadi Rp500.000. Usaha ini dikelola oleh dirinya dan keluarga tanpa tambahan karyawan. Penambahan menu juga membawa dampak positif terhadap jumlah pelanggan. Usahanya berkembang karena inovasi menu dan pemanfaatan bantuan modal dengan baik.²³

Ibu Sunarti berusia 50 tahun menjalankan usaha nasi pecel yang sudah lama berdiri. Ia mendapatkan bantuan modal sebesar Rp2.400.000 yang digunakan untuk membeli peralatan masak dan bahan-bahan dagangan. Sebelum mendapatkan bantuan, omset hariannya Rp250.000 dan meningkat menjadi Rp350.000 setelah bantuan. Usaha ini tetap dijalankan sendiri tanpa

²¹ Bapak Jamal, *Wawancara Bapak Jamal Pemilik Usaha Mie Aceh*, March 1, 2025.

²² Wawancara Ibu Dian Pemilik Usaha Minuman Dan Makanan Ringan, March 1, 2025.

²³ Wawancara Bapak Febri Penjual Nasi Ayam Geprek, March 1, 2025.

karyawan tambahan. Meski demikian, terjadi peningkatan jumlah pelanggan. Usahanya berkembang karena adanya peningkatan kualitas peralatan dan bahan.²⁴

Ibu Kasmini berusia 47 tahun merupakan pemilik usaha warung nasi. Bantuan modal ia gunakan untuk membeli bahan dan peralatan dapur, serta memperbaiki rompong. Omset sebelum mendapatkan banmod berkisar Rp100.000 per hari, dan setelahnya bisa mencapai Rp300.000 jika sedang ramai. Ia tidak memiliki karyawan dan mengelola usahanya sendiri. Penambahan pelanggan juga terjadi. Usahanya mengalami perkembangan meski tidak konsisten, karena sangat tergantung pada kondisi keramaian pasar.²⁵

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat pelaku usaha yang merasa usahanya tidak mengalami perkembangan, seperti Bapak Agung berusia 44 tahun adalah pemilik usaha warung kopi yang menggunakan bantuan modal untuk keperluan usaha. Namun, setelah menerima bantuan tersebut, ia tidak mengalami peningkatan omset, yang tetap sama seperti sebelum mendapatkan bantuan. Ia juga tidak menambah karyawan dan tidak mengalami peningkatan jumlah pelanggan.²⁶

Untuk mengetahui usaha tersebut berkembang atau tidaknya diperlukan tolak ukur yang relevan, apakah usaha tersebut telah memenuhi indikator-indikator dari pengembangan usaha atau belum, untuk mengetahuinya lebih lanjut berikut adalah ketiga indikator perkembangan usaha tersebut:

²⁴ Wawancara Ibu Sunarti Penjual Nasi Pecel, March 1, 2025.

²⁵ Wawancara Ibu Kasmini Pemilik Warung Nasi, March 1, 2025.

²⁶ Wawancara Bapak Agung Pemilik Warung Kopi, March 1, 2025.

Tabel 1. 5**Data Penerima Bantuan Modal Usaha DBHCHT di Kelurahan Bujel**

No	Nama Pelaku Usaha	Indikator Perkembangan Usaha	Keterangan
1	Bapak Takwin	1. Peningkatan omset penjualan	✓
		2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja	✓
		3. Pertumbuhan basis pelanggan	✓
2	Ibu Novita	1. Peningkatan omset penjualan	✓
		2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja	✗
		3. Pertumbuhan basis pelanggan	✓
3	Bapak Jamal	1. Peningkatan omset penjualan	✓
		2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja	✗
		3. Pertumbuhan basis pelanggan	✓
4	Ibu Dian	1. Peningkatan omset penjualan	✓
		2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja	✗
		3. Pertumbuhan basis pelanggan	✓
5	Bapak Febri	1. Peningkatan omset penjualan	✓
		2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja	✗
		3. Pertumbuhan basis pelanggan	✓
6	Ibu Sunarti	1. Peningkatan omset penjualan	✓
		2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja	✗
		3. Pertumbuhan basis pelanggan	✓
7	Ibu Kasmini	1. Peningkatan omset penjualan	✓
		2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja	✗
		3. Pertumbuhan basis pelanggan	✓
8	Bapak Agung	1. Peningkatan omset penjualan	✗
		2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja	✗
		3. Pertumbuhan basis pelanggan	✗

Sumber: Hasil Wawancara

Dalam penelitian awal ini peneliti mengambil delapan pelaku usaha sebagai responden, dari ke-delapan pelaku usaha tersebut tersebut terdapat satu pelaku usaha mikro dengan jenis usaha warung kopi bernama Bapak Agung yang merasa jika dana bantuan modal yang diberikan tidak membuat usahanya

berkembang dan cenderung sama seperti sebelum menerima bantuan modal usaha DBHCHT.²⁷

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yani Fitriani (2023) dari Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto membahas peran pembiayaan modal usaha dari Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa agunan ini membantu pelaku usaha, terutama perempuan prasejahtera, dalam memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan yang diberikan turut meningkatkan keterampilan manajemen usaha, memperluas skala bisnis, dan mendiversifikasi produk atau jasa yang ditawarkan. Secara keseluruhan, bantuan modal ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi keluarga serta pertumbuhan UMKM.²⁸

Selain itu, penelitian oleh Monica Febrina (2022) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh juga mengungkapkan manfaat bantuan modal usaha yang diberikan melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial kepada keluarga rentan di Desa Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berjalan cukup optimal dalam mendukung pengembangan usaha kecil. Bantuan modal yang

²⁷ Ibid.

²⁸ Yani Fitriani, "Peran Pembiayaan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

diberikan disertai dengan pendampingan yang membantu penerima modal dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka. Program ini berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan memperkuat perekonomian lokal. Kedua penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa bantuan modal dari pemerintah dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.²⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bantuan modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri terhadap perkembangan usaha mikro di Kelurahan Bujel, Kecamatan Majoroto. Penelitian ini difokuskan pada penerima tahun 2023 karena tahun tersebut mencatat jumlah penerima bantuan modal terbanyak yaitu sebanyak 10.631 pelaku usaha dan anggaran paling banyak dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 28 miliar lebih, yang kemudian akan diambil penerima pada tahap II yaitu sebanyak 1.602 pelaku usaha dan akan diteliti perkembangan usahanya dari tahun 2023 hingga tahun saat ini yaitu 2025.

Peneliti memilih tahap II dikarenakan pelaku usaha pada tahap ini merupakan sisa dari hasil perhitungan skor yang rendah terhadap penentuan penerima bantuan modal usaha. Dari 14 kelurahan yang ada, peneliti memilih Kelurahan Bujel sebagai fokus penelitian dikarenakan pada kelurahan ini tercatat sebanyak 164 pelaku usaha yang menerima bantuan modal, dari ke 13 kelurahan lainnya yang rata-rata hanya berjumlah kurang dari 160 pelaku usaha. Jenis usaha rumah makan (warung, kafe, restoran, kedai makanan, dan kedai

²⁹ Monica Febrina, "Analisis Peran Program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada Keluarga Rentan Oleh Dinas Sosial Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Kecil Di Desa Blang Rakal Kabupaten Bener Meriah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

minuman) dipilih menjadi fokus penelitian dikarenakan merupakan jenis usaha paling banyak dari pada ke 15 jenis usaha lainnya. Program bantuan modal usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebanyak Rp2.400.000 ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro dan menengah agar dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik, bertahan di tengah persaingan, bahkan berkembang.³⁰ Namun dari teori yang ada terdapat pelaku usaha yang merasa jika usahanya tidak mengalami perkembangan, hal ini mendorong peneliti melakukan kajian lebih mendalam untuk mengangkat penelitian dengan judul “Peran Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kelurahan Bujel Kecamatan Majoroto Kota Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran bantuan modal usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kelurahan Bujel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri?
2. Bagaimana peran bantuan modal usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada pengembangan usaha mikro di Kelurahan Bujel, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri?

³⁰ Asmaul Chusna and M. Tohamaksun, “5.617 UMKM Di Kota Kediri Dapat Bantuan Modal Usaha DBHCHT 2024.” last modified August 6, 2024, accessed December 14, 2024, https://www.antaranews.com/berita/4242139/5617-umkm-di-kota-kediri-dapat-bantuan-modal-usaha-dbchc-2024#google_vignette.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penyaluran bantuan modal usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran bantuan modal usaha terhadap pengembangan usaha mikro di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah terurai diatas, diperoleh manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teori, penulis berharap penelitian ini dapat memperluas pemahaman bagi para peneliti dan pembaca di bidang kewirausahaan, terutama terkait dengan modal usaha dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan yang berkontribusi terhadap keberhasilan suatu usaha. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi akademik yang bermanfaat dan dijadikan acuan dalam aktivitas akademis. Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian yang sama ataupun referensi bagi penelitian di masa mendatang.

2. Kegunaan Secara Praktis

a) Bagi Pelaku Usaha Mikro

Penelitian tentang pengaruh modal usaha dan pendampingan pengelolaan keuangan terhadap pengembangan pelaku UMKM dapat memberikan wawasan penting bagi pelaku UMKM untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkan modal mereka guna mendukung

pertumbuhan usaha.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya mengenai dampak modal usaha dan pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian mendatang, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan UMKM.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku pelaku usaha dan modal usaha dalam pengembangan usaha mikro. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memanfaatkan program-program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha mikro, seperti bantuan modal usaha.

d) Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan terhadap pengembangan suatu usaha. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aktivitas akademik di bidang kewirausahaan dan ekonomi mikro.

E. Telaah Pustaka

1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh, Skripsi di tulis oleh Yola Harninda (2022). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini mengkaji hubungan antara peran pemerintah dan pemberdayaan UMKM dalam industri pengolahan kopi di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran krusial, terutama dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan UMKM di sektor pengolahan kopi. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha guna mengoptimalkan potensi mereka agar dapat terus berkembang. Dalam konteks pendanaan, apabila UMKM menghadapi kendala, pemerintah turut berperan dalam memfasilitasi solusi secara mandiri.³¹

Dalam hal kesamaan, penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang juga membahas peran pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada bantuan pemerintah yang berbentuk sarana dan prasarana, sementara penelitian ini lebih mengedepankan bantuan modal tunai yang diberikan kepada pelaku usaha mikro.

³¹ Yola Harninda, "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

2. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh. Skripsi ditulis oleh M. Ilal Saputra (2022), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pemerintah Kota Meulaboh dalam memberdayakan UMKM di sektor industri konveksi. Dalam upaya tersebut, pemerintah mendukung pelaku UMKM dengan menyediakan modal, mesin jahit, dan peralatan jahit. Selain itu, pelatihan juga diselenggarakan untuk meningkatkan produktivitas serta membantu pelaku usaha dalam menerapkan manajemen yang lebih efektif. Tujuan dari program ini adalah agar usaha yang dijalankan dapat memberikan nilai tambah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produksi, baik dari segi jumlah maupun kualitas, serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha sehingga mereka menjadi lebih mandiri. Selain memberikan fasilitas, pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap UMKM yang telah menerima bantuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.³²

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, keduanya membahas peran pemerintah dalam mendukung pelaku usaha kecil. Namun, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran pemerintah dalam pengembangan UMKM khususnya di Kota Meulaboh, dengan fokus pada industri konveksi. Sementara itu, penelitian ini lebih

³² M. Ilal Saputra, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Industri Konveksi Di Kecamatan Johan Pahlawan Kota Meulaboh." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

berfokus pada peran pemerintah dalam memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan pengelolaan keuangan dari Disperindag kepada pelaku usaha mikro tanpa membatasi pada industri tertentu.

3. Peran Pembiayaan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas), skripsi ditulis oleh Yani Fitriani (2023), Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting permodalan yang diberikan oleh Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas dalam pengembangan usaha mikro, khususnya bagi perempuan prasejahtera. Dengan menyediakan pembiayaan modal usaha tanpa agunan, nasabah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan yang diberikan juga membantu nasabah dalam meningkatkan keterampilan manajemen usaha. Manfaat lainnya termasuk memperluas skala usaha, meningkatkan jenis produk atau jasa, serta membuka lokasi usaha baru. Secara keseluruhan, modal ini juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi keluarga.³³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yakni sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta bertujuan untuk mengkaji peran pembiayaan modal terhadap usaha mikro. Namun, perbedaan terdapat pada waktu, tempat, dan lokasi yang digunakan

³³ Yani Fitriani, "Peran Pembiayaan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerta, 2023).

oleh peneliti, serta pada pihak penyelenggara yang terlibat.

4. Analisis Peran Program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Kepada Keluarga Rentan Oleh Dinas Sosial Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Kecil di Desa Blang Rakal Kabupaten Bener Meriah), skripsi ditulis oleh Monica Febrina (2022), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran program bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam pelaksanaan serta pemberdayaan masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus objek penelitian pada pedagang kecil di Desa Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh di Desa Blang Rakal pada tahun 2020 telah berlangsung dengan cukup optimal.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus utama, yaitu peran bantuan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha mikro. Kedua penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan memperkuat perekonomian lokal. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks dan pendekatan yang digunakan. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih menekankan

³⁴ Monica Febrina, "Analisis Peran Program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada Keluarga Rentan Oleh Dinas Sosial Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Kecil Di Desa Blang Rakal Kabupaten Bener Meriah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

pada bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif (UEP) yang diberikan kepada keluarga rentan di Desa Blang Rakal dengan perspektif ekonomi Islam. Berbeda dengan itu, penelitian ini lebih berfokus pada bantuan modal dari pemerintah Kota Kediri untuk usaha mikro di Kecamatan Mojoroto, tanpa mengkhususkan pada jenis industri tertentu.

5. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Langkat ditulis leh Siti Nurhalita & Imsar. (2022) dari Fakultas Ekonomi ,Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penelitian sebelumnya mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah telah berkolaborasi dalam menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam mekanisme ini, pelaku usaha bekerja sama dengan koperasi-koperasi di Kabupaten Langkat dalam proses peminjaman dana. Selain itu, untuk memastikan bahwa bantuan dana diberikan secara tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Langkat menerapkan strategi berupa pengumpulan data terkait para pelaku usaha serta lokasi usaha mereka. Data ini akan diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM, sehingga langkah pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif.³⁵

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai peran pemerintah dalam mendukung pelaku usaha kecil melalui bantuan permodalan. Namun,

³⁵ Siti Nurhalita and Imsar, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Langkat,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin* Vol. 5, no. 1 (May 2022): 88, <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

perbedaan utama penelitian kali ini adalah fokusnya yang hanya pada peran bantuan modal usaha dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan untuk mengembangkan pelaku usaha mikro, tanpa melibatkan aspek pinjaman atau pengembalian dana.